



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA
S.D. TRIWULAN II TAHUN 2019**

NOMOR : LKIN- 253/PW20/6/2019
TANGGAL : 5 JULI 2019



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jalan Balai Kota Nomor 15, Kota Kendari 93117.
Telepon/Faksimili (0401) 3121380 / (0401) 3122126
e-mail: sultra@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-253/PW20/6/2019

5 Juli 2019

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Tenggara s.d. Triwulan II Tahun 2019

Yth.

Sekretaris Utama

u.p. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola
di Jakarta

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara s.d. Triwulan II Tahun 2019.

1. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja

Dari 16 Indikator Kinerja Program (IKP) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 9 IKP diukur pada triwulan II tahun 2019. Capaian kinerja IKP sampai dengan Triwulan II tahun 2019 sebagai berikut:

1) IKP : Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan adalah sebanyak 11 PKA dari 22 laporan pengawasan keinvestigasian yang diterbitkan dalam tiga tahun terakhir atau 50% dari yang ditargetkan sampai dengan triwulan I tahun 2019. Dengan demikian capaian IKP "Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan" sebesar 166,67% dari target sampai dengan triwulan dan mencapai 83,37% dari target tahun 2019.

2) IKP: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh Aparat Penegak Hukum

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH adalah sebanyak 0 laporan dari satu Laporan Audit Investigatif yang terbit sampai dengan semester II tahun 2019 atau 0 %. Dengan demikian capaian IKP "Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh Aparat Penegak Hukum" sebesar

0% dari target sampai dengan triwulan I dan mencapai 0% dari target tahun 2019. Hambatan Pencapaian IKP antara lain disebabkan oleh adanya kebijakan penghentian sementara proses pengusutan Tindak Pidana Korupsi oleh Aparat Penegak hukum sampai dengan Pemilihan Umum 2019 selesai dilaksanakan.

- 3) IKP : Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
Sampai dengan triwulan II tahun 2019 terdapat satu K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP dari dua penugasan FCP yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2019. Dengan demikian, capaian IKP "Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) sebesar 50,00%, dan mencapai 90,91% dari target tahun 2019.
- 4) IKP : Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3
Sampai dengan triwulan II tahun 2019, berdasarkan hasil *self assessment* oleh Inspektorat yang telah direviu oleh BPKP, maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada level 3. Dengan demikian, capaian IKP "Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3" adalah sebesar 100% dari target triwulan II tahun 2019 maupun dari target tahun 2019 sebesar 100%.
- 5) IKP : Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3
Sampai dengan triwulan II tahun 2019, pemerintah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP level 3 adalah sebanyak 3 Kabupaten dari total 17 kabupaten/kota atau sebesar 17,65% berdasarkan hasil *quality assurance* oleh Tim Satgas SPIP Deputi PKD. Dengan demikian, capaian IKP "Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3" adalah sebesar 24,86% dari target triwulan II maupun target tahun 2019 sebesar 71%. Hambatan pencapaian target IKP antara lain:
 - a) Pemerintah kabupaten/kota belum menetapkan target maturitas SPIP dalam RPJMD sehingga penerapan SPIP masih belum menjadi prioritas Pemda
 - b) Kurangnya komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan SPIP
 - c) Kurangnya pemahaman SDM OPD dan APIP dalam penyelenggaraan SPIP dan penyiapan dokumen peningkatan maturitas SPIP.

6) IKP : Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2
Sampai dengan triwulan II tahun 2019, jumlah pemerintah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP level II adalah sebanyak 9 kabupaten/kota dari total 17 pemerintah kabupaten/kota atau 52,94%. Dengan demikian, capaian IKP “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP Level 2” adalah sebesar 182,56% dari target sampai dengan triwulan I tahun 2019, dan mencapai 311,42% dari target tahun 2019.

7) IKP : Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3
Sampai dengan triwulan II tahun 2019, APIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum mencapai kapabilitas level 3. Dengan demikian, capaian IKP “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3” sebesar 0,00% dari target sampai dengan triwulan I maupun untuk target tahun 2019 sebanyak 1 APIP pemerintah provinsi atau sebesar 100%.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain:

- a) Kurangnya pemahaman pimpinan daerah terhadap pentingnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan lemahnya komitmen pimpinan daerah dalam pemberian akses dan penyediaan sumber daya kepada APIP.
- b) Pimpinan APIP belum dapat mengoptimalkan penggunaan/pengalokasian sumber daya APIP agar ekonomis, efisien, dan efektif.
- c) Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP belum berperan aktif dalam peningkatan Kapabilitas APIP.
- d) Jumlah Auditor APIP belum memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan. Di samping itu, sering dilakukan mutasi dan promosi auditor ke OPD dan jabatan struktural lain, pegawai yang telah mengikuti dan lulus diklat pembentukan auditor maupun lulus *inpassing* belum diangkat oleh Kepala Daerah, dan belum ada pemberian tunjangan auditor serta penghargaan pegawai terbaik sehingga mengurangi motivasi pegawai untuk menjadi auditor.
- e) Penyediaan anggaran pengawasan APIP belum mencapai minimal 1% sesuai Permendagri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009.
- f) Masih sangat terbatasnya sarana prasarana APIP termasuk dukungan penyediaan teknologi informasi.

8) IKP: Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3 Sampai dengan triwulan II tahun 2019, capaian persentase APIP pemerintah kabupaten/kota dengan kapabilitas level 3 masih 0% dari delapan APIP pemerintah kabupaten/kota atau sebesar 47% yang ditargetkan sampai triwulan II tahun 2019. Dengan demikian capaian IKP "Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3" masih 0% baik untuk target sampai triwulan I, maupun untuk target tahun 2019 yang ditargetkan sebanyak 59% atau 10 APIP pemerintah kabupaten/kota dari total 17 APIP pemerintah kabupaten/kota.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain :

- a) Kurangnya pemahaman dan komitmen pimpinan daerah dalam penunjukan Inspektur yang kapabel serta pemberian akses dan penyediaan sumber daya, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta penyediaan sarana yang memadai.
- b) Kurangnya pemahaman dan komitmen pimpinan APIP terhadap peningkatan kapabilitas APIP, terutama dalam mengoptimalkan penggunaan/pengalokasian sumber daya APIP agar ekonomis, efisien, dan efektif.
- c) Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP belum berperan aktif dalam peningkatan Kapabilitas APIP.
- d) Jumlah Auditor APIP belum memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan. Di samping itu, sering dilakukan mutasi dan promosi auditor ke OPD dan jabatan struktural lain, pegawai yang telah mengikuti dan lulus diklat pembentukan auditor maupun lulus *inpassing* belum diangkat oleh Kepala Daerah, dan belum ada pemberian tunjangan auditor serta penghargaan pegawai terbaik sehingga mengurangi motivasi pegawai untuk menjadi auditor.
- e) Penyediaan anggaran pengawasan APIP belum mencapai minimal 1% sesuai Permendagri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009.
- f) Masih sangat terbatasnya sarana prasarana APIP termasuk dukungan penyediaan teknologi informasi.

9) IKP: Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2 Sampai dengan triwulan II tahun 2019, Jumlah APIP kabupaten/kota dengan Kapabilitas Level 2 sebanyak 13 APIP pemerintah kabupaten/kota atau 76,47% Dengan demikian capaian IKP "Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2" sebesar 305,88% dari target sampai dengan triwulan II sebesar 25% dan mencapai 186,51% dari target tahun 2019 sebesar 41%.

Rincian target dan realisasi *outcome* sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2019 disajikan pada Lampiran 1

2. Pencapaian Target *Output* Pengawasan

Sesuai Perjanjian Kinerja/RKA terakhir, pada tahun 2019, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara ditargetkan untuk menghasilkan *output* sebanyak 229 laporan.

Realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 92 laporan atau 98,92% dari rencana Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 93 laporan. Realisasi sebanyak 92 laporan tersebut berasal dari *output* atas PKPT awal sebanyak 77 laporan dan PKPT tambahan sebanyak 15 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 40,17% dari rencana *output* sebanyak 229.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 2a.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar *output* pengawasan yang telah terealisasi adalah fokus pengawasan Pengawasan Program Prioritas Nasional dan Peningkatan *Governance System*, yaitu masing-masing fokus sebanyak 37 laporan atau 40,22% dari total laporan terbit s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 92 laporan.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 2b.

3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

a. PKPT Awal sesuai Perjanjian Kinerja/RKA Terakhir

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) PKPT awal s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 96 PP atau 72,73% dari Rencana Mulai Penugasan (RMP) s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 132 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal s.d. Triwulan II Tahun 2019

tercapai 41,92% dari RMP sebanyak 229 PP. Realisasi yang di bawah target disebabkan terdapat penugasan pengawasan tambahan yang membutuhkan banyak personil auditor dan hari pengawasannya.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 77 laporan atau 82,80% dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL) s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 93 laporan. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 33,62% dari RPL sebanyak 229 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 77 laporan atau 80,21% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya. Hal ini disebabkan beberapa kegiatan pengawasan masih dalam proses pelaksanaan maupun laporan hasil pengawasan masih dalam proses reviu sehingga laporannya belum terbit.

Jumlah PP dengan RMP s.d. Triwulan II Tahun 2019 yang belum terealisasi sebanyak 49 PP dan jumlah LHP dengan RPL s.d. Triwulan II Tahun 2019 yang belum terealisasi sebanyak 66 LHP. Alasan belum terealisasinya PP dan LHP disajikan pada Lampiran 7.

Realisasi PP s.d. Triwulan II Tahun 2019 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 87 PP atau 90,63% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-*entry* sebanyak 67 laporan atau 87,01% dari jumlah laporan terbit. Adanya ST dan Laporan terbit yang belum di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA disebabkan beberapa laporan hasil pengawasan intern masih dalam status reviu pada aplikasi SIMA.

b. PKPT Tambahan

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 19 PP atau 100% dari RMP sebanyak 19 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 100% dari RMP s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 19 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 15 laporan atau 100% dari RPL s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 15 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d. s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 100% dari rencana sebanyak 15 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 15 laporan atau 78,95% dari PP yang telah terbit Surat

Tugasnya. Adanya Surat Tugas yang sudah terbit namun belum terbit laporan hasil pengawasannya disebabkan penugasan pengawasannya masih berlangsung sehingga laporan belum bisa diterbitkan.

Realisasi PP s.d. Triwulan II Tahun 2019 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 15 PP atau 78,95% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-*entry* sebanyak 10 laporan atau 66,67% dari jumlah laporan terbit. Adanya ST dan Laporan terbit yang belum di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA disebabkan belum tersedianya KAP untuk penugasan tersebut.

c. KAP Generik

Selain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara juga melaksanakan penugasan dengan menggunakan KAP Generik yang s.d. Triwulan II Tahun 2019 telah terlaksana sebanyak 1 PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak 1 PP tersebut, telah terbit laporan sebanyak 1 laporan.

Realisasi PP s.d. Triwulan II Tahun 2019 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 1 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-*entry* sebanyak 1 laporan atau 100% dari jumlah laporan terbit.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 3a, sedangkan pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam Lampiran 3b.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan (PKAU)

Realisasi penugasan PKAU s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 35 PP atau 102,94% dari rencana sebanyak 34 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan PKAU s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 49,30% dari rencana sebanyak 71 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 28 laporan/dokumen atau 107,69% dari rencana sebanyak 26 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 39,44% dari rencana sebanyak 71 laporan/dokumen.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 4.

5. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 adalah sebanyak 5952 OH atau 46,16% dari rencana hari pengawasan satu tahun sebanyak 12.895 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif (Total OH PKPT awal + OH PKPT Tambahan + OH PKPT Generik + OH PKAU) per pegawai s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 80,07 OH atau 33,79 % dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

Rincian realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 5.

6. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebesar Rp10.852.676.834,00 atau 95,88% dari rencana sebesar Rp11.318.675.323,82 Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp21.254.596.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 51,06%.

Rincian rencana dan realisasi anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 6.

Demikian laporan kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 kami sampaikan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,

Yan Setiadi

NIP 19690913 199003 1 001

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja
Triwulan II 2019

No.	Indikator Kinerja Program	Rencana		Realisasi s.d. Triwulan ini	Capaian (%)	
		Tahun 2019	s.d. Triwulan ini		Tahun 2019	s.d. Triwulan ini
1	2	3	4	5	6=5/3x100	7=5/4x100
A. Pengawasan						
1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG baik				0,00%	0,00%
3	Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (baik)				0,00%	0,00%
4	Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi	65,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan	60,00%	30,00%	50,00%	83,33%	166,67%
7	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH	75,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K				0,00%	0,00%
11	Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	55,00%	0,00%	50,00%	90,91%	0,00%
13	Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajaran Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2					
16	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	71,00%	71,00%	17,65%	24,86%	24,86%
17	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	29,00%	17,00%	52,94%	182,56%	311,42%
18	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2					
20	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	59,00%	47,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	41,00%	25,00%	76,47%	186,51%	305,88%

Perwakilan BPPK Provinsi Sulawesi Tenggara
Target dan Realisasi Output Pengawasan
Triwulan II 2019

Lampiran 2a

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target sesuai Perkin/RKA Terakhir		Realisasi s.d. Triwulan Ini			Capaian (%)	
			Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPPK	Laporan	39	21	8	3	11	28,21%	52,38%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPPK	Laporan	84	32	29	12	41	48,81%	128,13%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPPK	Laporan	12	0	8	0	8	66,67%	100,00%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPPK	Laporan	16	8	8	0	8	50,00%	100,00%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPPK	Laporan	6	6	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPP Perwakilan BPPK	Laporan	39	12	14	0	14	35,90%	116,67%
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPPK	Laporan	33	14	10	0	10	30,30%	71,43%
	Jumlah		229	93	77	15	92	40,17%	98,92%

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Target dan Realisasi Output Pengawasan dari Sudut Fokus Pengawasan
Triwulan II 2019

No.	Fokus Pengawasan	Satuan	Target sesuai Perkin/RKA Terakhir		Realisasi s.d. Triwulan Ini			Capaian (%)		Proporsi Realisasi Fokus Thd Total Realisasi (%)
			Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	
1			4	5	6	7	8=6+7	9=8/4x100	10=8/5x100	11
1	Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional	Laporan	94	49	25	12	37	39,36%	75,51%	40,22%
2	Peningkatan Ruang Fiskal	Laporan	8	2	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3	Pengamanan Aset Negara/Daerah	Laporan	30	11	15	3	18	60,00%	163,64%	19,57%
4	Peningkatan Governance System	Laporan	97	31	37	0	37	38,14%	119,35%	40,22%
	Jumlah		229	93	77	15	92	40,17%	98,92%	100,00%

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Realisasi Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
Triwulan II 2019

No.	Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan	Pengawasan Pengawasan (PP)										Laporan Hasil Pengawasan					
		RMP		Capaian (%)		Input dalam SIMA		RPI		Capaian (%)		Input dalam SIMA		% Realisasi Laporan Dibaerndingkan Realisasi PP			
		Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Realisasi s.d. Triwulan Ini	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Realisasi s.d. Triwulan Ini	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini		Jumlah Lap Diinput dim SIMA	% Lap yg Diinput dalam SIMA	
1	PKPT	2	3	4	5	6-5/3*100	7-5/4*100	8	9=8/5*100	10	11	12	13=12/10*100	14=12/11*100	15	16=15/12*100	17=12/5*100
A	PKPT Awal																
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	39	21	14	35,90%	66,67%	10	71,43%	39	21	8	20,51%	38,10%	8	100,00%	57,14%	
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	94	47	33	39,29%	70,21%	28	84,85%	84	32	29	34,52%	90,63%	21	72,41%	87,88%	
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Intezasi Perwakilan BPKP	12	9	8	66,67%	88,89%	8	100,00%	12	0	8	66,67%	100,00%	8	100,00%	100,00%	
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	16	8	8	50,00%	100,00%	8	100,00%	16	8	8	50,00%	100,00%	8	100,00%	100,00%	
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilih Tahun 2019 Perwakilan BPKP	6	6	6	100,00%	100,00%	6	100,00%	6	6	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPiP Perwakilan BPKP	39	27	14	35,90%	51,85%	14	100,00%	39	12	14	35,90%	116,67%	12	85,71%	100,00%	
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APiP Perwakilan BPKP	33	14	13	39,39%	92,86%	13	100,00%	33	14	10	30,30%	71,43%	10	100,00%	76,92%	
	Sub Jumlah 1	229	132	96	41,92%	72,73%	87	90,63%	229	93	77	33,62%	82,80%	67	87,01%	80,21%	
2	PKPT Tambahan																
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	4	4	4	100,00%	100,00%	3	75,00%	3	3	3	100,00%	100,00%	1	33,33%	75,00%	
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	15	15	15	100,00%	100,00%	12	80,00%	12	12	12	100,00%	100,00%	9	75,00%	80,00%	
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Intezasi Perwakilan BPKP	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilih Tahun 2019 Perwakilan BPKP	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPiP Perwakilan BPKP	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APiP Perwakilan BPKP	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
	Sub Jumlah 2	19	19	19	100,00%	100,00%	15	78,95%	15	15	15	100,00%	100,00%	10	66,67%	78,95%	
	Jumlah A	248	151	115	46,37%	76,16%	102	88,70%	244	108	92	37,70%	85,19%	77	83,70%	80,00%	
B	KAP Generik																
	Sub Jumlah B	1	1	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	1	1	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	100,00%	
	Total A+B	249	152	116	46,59%	76,32%	103	88,79%	245	109	93	37,96%	85,32%	78	83,87%	80,17%	

**Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Realisasi Pengawasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
Triwulan II 2019**

Lampiran 3b

No.	Jenis PKRT/Bidang	Pengawasan Pengawasan (PP)					Laporan Hasil Pengawasan					% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP				
		RMP		Capaian (%)		Input dalam SIMA		RPL		Capaian (%)			Input dalam SIMA			
		Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Realisasi s.d. Triwulan Ini	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Realisasi s.d. Triwulan Ini	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Jumlah Lap Diinput dim SIMA	% Lap yg diinput dalam SIMA	
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9=8/5*100	10	11	12	13=12/10*100	14=12/11*100	15	16=15/12*100	17=12/5*100
PKRT																
1 PKRT Awal																
	IPP	70	47	27	38,57%	57,45%	23	85,19%	70	47	15	21,43%	31,91%	13	86,67%	55,56%
	AN	29	14	11	37,93%	78,57%	10	90,91%	29	2	10	34,48%	500,00%	9	90,00%	90,91%
	APD	71	43	29	40,85%	67,44%	29	100,00%	71	21	29	40,85%	138,10%	29	100,00%	100,00%
	Investigasi	29	15	17	58,62%	113,33%	13	76,47%	29	10	14	48,28%	140,00%	7	50,00%	82,35%
	P3A	30	13	12	40,00%	92,31%	12	100,00%	30	13	9	30,00%	69,23%	9	100,00%	75,00%
	Sub Jumlah 1	229	132	96	41,92%	72,73%	87	90,63%	229	93	77	33,62%	82,80%	67	87,01%	80,21%
2 PKRT Tambahan																
	IPP	7	7	7	100,00%	100,00%	7	100,00%	6	6	6	100,00%	100,00%	5	83,33%	85,71%
	AN	6	6	6	100,00%	100,00%	5	83,33%	6	6	6	100,00%	100,00%	5	83,33%	100,00%
	APD	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Investigasi	6	6	6	100,00%	100,00%	3	50,00%	3	3	3	100,00%	100,00%	0	0,00%	50,00%
	P3A	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Sub Jumlah 2	19	19	19	100,00%	100,00%	15	78,95%	15	15	15	100,00%	100,00%	10	66,67%	78,95%
	Jumlah A	248	151	115	46,37%	76,16%	102	88,70%	244	108	92	37,70%	85,19%	77	83,70%	80,00%
B KAP Generik																
	IPP	1	1	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	1	1	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	100,00%
	AN	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	APD	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Investigasi	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	P3A	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Sub Jumlah B	1	1	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	1	1	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	100,00%
	Total	249	152	116	46,59%	76,52%	103	88,79%	245	109	93	37,96%	85,32%	78	83,87%	80,17%

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Triwulan II 2019

Lampiran 4

No.	Bidang/Bagian	Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU)					Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan					% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP
		Tahun 2019	RMP s.d. Triwulan Ini	Realisasi s.d. Triwulan Ini	Capaian (%) Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Tahun 2019	RPL s.d. Triwulan Ini	Realisasi s.d. Triwulan Ini	Capaian (%) Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9	10	11=10/8*100	12=10/9*100	13=10/5*100
1	P3A	57	28	29	50,88%	103,57%	57	20	22	38,60%	110,00%	75,86%
2	TU	14	6	6	42,86%	100,00%	14	6	6	42,86%	100,00%	100,00%
	Jumlah	71	34	35	49,30%	102,94%	71	26	28	39,44%	107,69%	80,00%

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Realisasi Hari Produktif
Triwulan II 2019

No.	Output	Rencana OH Tahun 2019	Realisasi OH s.d. Triwulan Ini			% Realisasi OH terhadap Rencana OH Tahun 2019	Jumlah Pegawai	Potensi OH		Capaian (%)		OH per Pegawai s.d. Triwulan Ini
			Atas PKPT/ PKAU Awal	Atas PKPT/ PKAU Tambahan	Jumlah OH			Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	
1	PKPT	2	3	4	5	6=4+5	8	9	11=6/9*100	12=6/10*100	13=6/8	
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	2.445	447	193	640	26,18%						
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	5.015	1.235	2.181	3.416	68,12%						
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	360	238	0	238	66,11%						
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	720	233	0	233	32,36%						
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemtlu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	600	403	0	403	67,17%						
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SIPP Perwakilan BPKP	2.000	496	0	496	24,80%						
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	1.755	526	0	526	29,97%						
	Perhitungan Hari Pengawasan (Sub Jumlah A)	12895	3578	2374	5952	46,16%						
B	KAP Generik				56							
	Sub Jumlah B				56							
	Jumlah PKPT dan KAP Generik				6008							
C	PKAU				2.880	51,85%						
	Total PKPT + KAP Generik + PKAU	5.555	2.880	0	8888							
	Perhitungan Hari Produktif				8.888		111	26307	13153,5	33,79%	67,57%	80,07

**Perwakilan BPPK Provinsi Sulawesi Tenggara
Realisasi Penyerapan Anggaran
Triwulan II 2019**

Lampiran 6

No	Program/IKK	Anggaran			Realisasi s.d. Triwulan Ini	% Capaian Penyerapan	
		Tahun 2019 (Rp)	s.d. Triwulan Ini (Rp)	Triwulan Ini (Rp)		Terhadap Anggaran 2019 (%)	Terhadap Rencana s.d. Triwulan Ini (%)
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	
A	Program 06						
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPPK	621.660.000,00	341.440.000,00	60.435.300,00	9,72%	17,70%	
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPPK	2.286.610.000,00	1.733.830.000,00	1.108.266.209,00	48,47%	63,92%	
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPPK	409.740.000,00	298.305.000,00	81.906.300,00	19,99%	27,46%	
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPPK	405.472.000,00	194.736.000,00	102.930.800,00	25,39%	52,86%	
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPPK	336.126.000,00	330.126.000,00	54.700.000,00	16,27%	16,57%	
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPP Perwakilan BPPK	890.114.000,00	692.051.142,00	405.323.665,00	45,54%	58,57%	
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APiP Perwakilan BPPK	526.020.000,00	209.160.000,00	132.105.747,00	25,11%	63,16%	
	Sub Jumlah Program 06	5.475.742.000,00	3.799.648.142,00	1.945.668.021,00	35,53%	51,21%	
B	Program 01						
		15.778.854.000,00	7.519.027.181,82	8.907.008.813,00	56,45%	118,46%	
	Total	21.254.596.000,00	11.318.675.323,82	10.852.676.834,00	51,06%	95,88%	

Petunjuk pengisian:

1. Kolom 3 diisi anggaran satu tahun sesuai DIPA;
2. Kolom 4 diisi sesuai rencana dalam *Disbursement Plan* ;
3. Kolom 5 diisi jumlah realisasi s.d. periode (bulan/triwulan) pelaporan berdasarkan SP2D.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Hambatan Pencapaian Target
Penugasan Pengawasan (PP) dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Triwulan II 2019

Lampiran 7

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah PP/LHP	Kendala	Keterangan
1	2	3	4	5
RMP s.d. Triwulan Ini yang Belum Realisasi				
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	8	Belum ada arahan/instruksi rendal	Terdapat beberapa kegiatan pengawasan seperti Monitoring KSP dan Reviu Padat Karya yang belum terdapat instruksi dari rendal
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	20	Mendahulukan penugasan lain yang lebih prioritas	Beberapa penugasan belum dapat terlaksana karena belum terdapat permintaan dari mitra kerja dan mendahulukan penugasan lain yang lebih prioritas seperti Audit Dana Jaminan Sosial
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	4	Lainnya	RPL penugasan bulan Desember 2019
4	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	15	K/L/P belum siap	Pemda belum siap untuk dilaksanakan Quality Assurance level dan masih dalam proses bimbingan teknis
5	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	2	Mendahulukan penugasan lain yang lebih prioritas	Beberapa penugasan belum dapat terlaksana karena mendahulukan penugasan lain yang lebih prioritas
Jumlah		49		
RPL s.d. Triwulan Ini yang Belum Realisasi				
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	13	Tim masih dalam penugasan di lapangan	Terdapat juga beberapa kegiatan pengawasan seperti Monitoring KSP dan Reviu Padat Karya yang belum terdapat instruksi dari rendal

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah PP/LHP	Kendala	Keterangan
1	2	3	4	5
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	23	Penugasan belum terlaksana	Beberapa penugasan belum dapat terlaksana karena belum terdapat permintaan dari mitra kerja dan mendahulukan penugasan lain yang lebih prioritas seperti Audit Dana Jaminan Sosial
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	4	Lainnya	RPL penugasan bulan Desember 2019
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	6	Tim masih dalam penugasan di lapangan	Tim masih melakukan pengawasan di lapangan hingga pertengahan bulan Juli 2019
5	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	15	Penugasan belum terlaksana	Pemda belum siap untuk dilaksanakan Quality Assurance level dan masih dalam proses bimbingan teknis
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	5	Masih dalam proses reviu berjenjang	Terdapat pula beberapa penugasan belum berjalan karena memprioritaskan kegiatan pengawasan lainnya.
Jumlah		66		